

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN DAN KEMASYARAKATAN (CIVIC AND CITIZENSHIP EDUCATION-- CCE): KONTEKS DAN TANTANGAN GLOBAL

Agus Wahyudi
FAKULTAS FILSAFAT UGM



Sejarah Pendidikan CCE: Konteks Global

1. Masa Kuno hingga Revolusi Politik

- Pendidikan kewarganegaraan informal untuk kelas penguasa.
- Revolusi Amerika dan Prancis membawa perubahan politik besar, tetapi tidak memperluas inklusi sosial.

2. Abad ke-19: Pendidikan Massal

- Pendidikan massal muncul untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi.
- Fokus pada loyalitas, patriotisme, kerja keras, dan moralitas.

3. Abad ke-20: Perluasan Tujuan

- Setelah Perang Dunia I, pendidikan kewarganegaraan mulai mencakup demokrasi, toleransi, dan inklusi sosial.
- CCE menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah.

Source:

Kennedy, Kerry J. *Civic and Citizenship Education in Volatile Times: Preparing Students for Citizenship in the 21st Century*. SpringerBriefs in Citizenship Education for the 21st Century, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019



Pendekatan Teoretis CCE

1. Konservatif vs. Progresif

- **Konservatif:** Fokus pada nilai-nilai masa lalu, harmoni, dan stabilitas.
- **Progresif:** Partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial untuk membangun masa depan.

2. Post-Strukturalis

- Melihat “konsolidasi demokrasi” sebagai alat negara untuk menghasilkan warga negara yang patuh, merasa puas dengan *status-quo*.
- Melakukan kritik terhadap pendekatan tradisional yang mendukung *status quo*.

Source:

Kennedy, Kerry J. *Civic and Citizenship Education in Volatile Times: Preparing Students for Citizenship in the 21st Century*. SpringerBriefs in Citizenship Education for the 21st Century, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019



Bottom Line (Konteks Politik Menentukan Tujuan CCE)

- CCE dapat mendukung negara authoritarian, kediktatoran, dan bentuk-bentuk asosiasi politik non-demokratik,
- Sebaliknya, CCE juga dapat mendukung negara demokratik.



Dekonsolidasi Demokrasi

- Di sejumlah negara Barat, Australia dan Amerika, komitmen pada konsolidasi demokrasi umumnya tidak menjadi masalah sampai pertengahan abad 20: tetapi, memasuki abad 20, terjadi penurunan dukungan terhadap rezim-rezim demokratik tradisional (dekonsolidasi demokrasi) sebagai akibat dari polarisasi internal, ancaman terorisme internasional, dan peningkatan perlawanan terhadap nilai-nilai demokrasi liberal.
- Perkembangan itu membawa kesadaran di banyak institusi Pendidikan di Barat bahwa CCE perlu diarahkan untuk mengatasi dekonsolidasi demokrasi, memperkuat konsolidasi demokrasi, bukan untuk melayani feodalisme, authoritarianisme atau autokrasi
- Sebagai dukungan terhadap negara demokrasi: CCE bukan sekadar alat sosialisasi negara, melainkan **instrumen pembentukan warga yang otonom, kritis, dan partisipatif**. Dalam konteks demokrasi, CCE bertujuan **menguatkan konsolidasi demokrasi**, bukan melanggengkan kekuasaan elite, dinasti atau oligarki.



Teori tentang Pentahapan Demokrasi

- **Liberalisasi politik**
Rezim otoriter mulai melonggarkan kontrol: pembatasan kebebasan berpendapat berkurang, ruang oposisi dan masyarakat sipil mulai terbuka. Tahap ini masih rapuh dan mudah dibalik.
- **Transisi demokrasi**
Terjadi perubahan institusional utama, seperti pemilu kompetitif, reformasi konstitusi, dan pergantian kekuasaan secara relatif damai. Namun, aturan main demokrasi belum sepenuhnya stabil.
- **Konsolidasi demokrasi**
Demokrasi menjadi *the only game in town*: aktor politik utama menerima aturan demokrasi, lembaga berjalan efektif, supremasi hukum ditegakkan, dan militer/birokrasi tunduk pada kontrol sipil.
- **Kematangan rezim demokratik**
Demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi **substansial**:
 - hak-hak warga terlindungi secara nyata,
 - partisipasi politik inklusif dan bermakna,
 - akuntabilitas dan keadilan sosial diperkuat,
 - konflik diselesaikan melalui mekanisme demokratis tanpa ancaman kemunduran otoritarian.

Konsolidasi Demokrasi (termasuk di Negara Barat) dewasa ini menghadapi Ancaman Pengaruh-Pengaruh Sosial dan Ekonomi Penting:

• Globalisasi

- **Globalisasi sebagai liberalisasi dalam pengertian “kebebasan dari pembatasan”:** perdagangan bebas lintas negara, mobilitas warga negara antarnegara yang relatif tanpa hambatan, pembatasan tenaga kerja seminimal mungkin, serta pembongkaran berbagai bentuk regulasi yang dipandang membatasi kebebasan warga negara. Dalam kerangka ini, **neoliberalisme** dipahami sebagai suatu rezim yang mengandaikan **warga negara yang mengatur dirinya sendiri** (*self-regulating citizens*).
- **Globalisasi sebagai upaya untuk “mengatur warga negara yang mengatur dirinya sendiri”:** kembalinya peran negara dalam menyuntikkan pendanaan, ketertiban, dan regulasi ke dalam proses globalisasi yang sebelumnya berlangsung secara tidak terkendali dan didorong oleh mekanisme pasar. Dalam perspektif **kewargaan global** (sebagaimana dikembangkan oleh UNESCO dan OECD), ditekankan kebutuhan akan **pemahaman global**, alih-alih promosi wacana nasionalisme yang sempit. Warga negara masa depan dituntut memiliki **nilai-nilai global** dan **keterampilan global** guna merespons berbagai ancaman globalisasi, sekaligus menciptakan ruang-ruang yang positif dan konstruktif bagi perkembangan serta kreativitas manusia.

• Populisme / Politik Identitas

- Ferguson (2016) berargumen bahwa populisme merupakan penerus alami sekaligus respons terhadap globalisasi yang, menurut ungunya, telah “menjadi kacau balau di hadapan mata kita”. Ia menafsirkan kemungkinan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat sebagai penanda “lonceng kematian globalisasi”. Namun demikian, Gos (2016) menegaskan bahwa meskipun terdapat kecenderungan untuk menyalahkan “para pihak yang dirugikan oleh globalisasi” atas kebangkitan populisme, penjelasan yang lebih memadai justru perlu dicari di luar kerangka tersebut.
- Fenomena ini tercermin dalam figur-figur politik seperti Donald Trump di Amerika Serikat, Pauline Hanson di Australia, Nigel Farage di Britania Raya, Marine Le Pen di Prancis, Alice Weidel di Jerman, Christoph Blocher di Swiss, Sebastian Kurz di Austria, Viktor Orbán di Hungaria, serta Mateusz Morawiecki di Polandia. Meskipun beroperasi dalam konteks nasional yang berbeda, pesan politik yang disampaikan pada dasarnya seragam: melindungi bangsa, memperketat kontrol perbatasan, menyingkirkan orang asing, memulihkan lapangan kerja nasional, dan merebut kembali kejayaan masa lalu.

• Fundamentalisme / Radikalisme

- Fundamentalisme atau radikalisme dapat dipahami sebagai **keterikatan yang kaku pada seperangkat keyakinan yang dianggap tidak dapat direduksi**, atau pada suatu sistem teologis maupun ideologis yang **menutup kemungkinan pengajuan pertanyaan, kritik, dan refleksi lebih lanjut**.
- Problem “epistemic seclusion” (keterkungkungan epistemic): individu terputus dari informasi selain retorika fundamentalis dan pandangan pembanding tidak pernah disajikan atau dirawat.

• Media Sosial

- Berperan Mengubah wajah politik abad ke-21 dan Alat untuk koordinasi gerakan politik dan penyebaran informasi.
- Berpotensi Mendukung demokrasi dan perubahan sosial dan juga dapat digunakan oleh populis dan fundamentalis untuk tujuan negatif.
- **Tantangan CCE:** adalah Mendidik generasi muda tentang penggunaan media sosial secara moral. dan Mengembangkan nilai-nilai abad ke-21: evaluasi kritis, keputusan moral, dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Source:

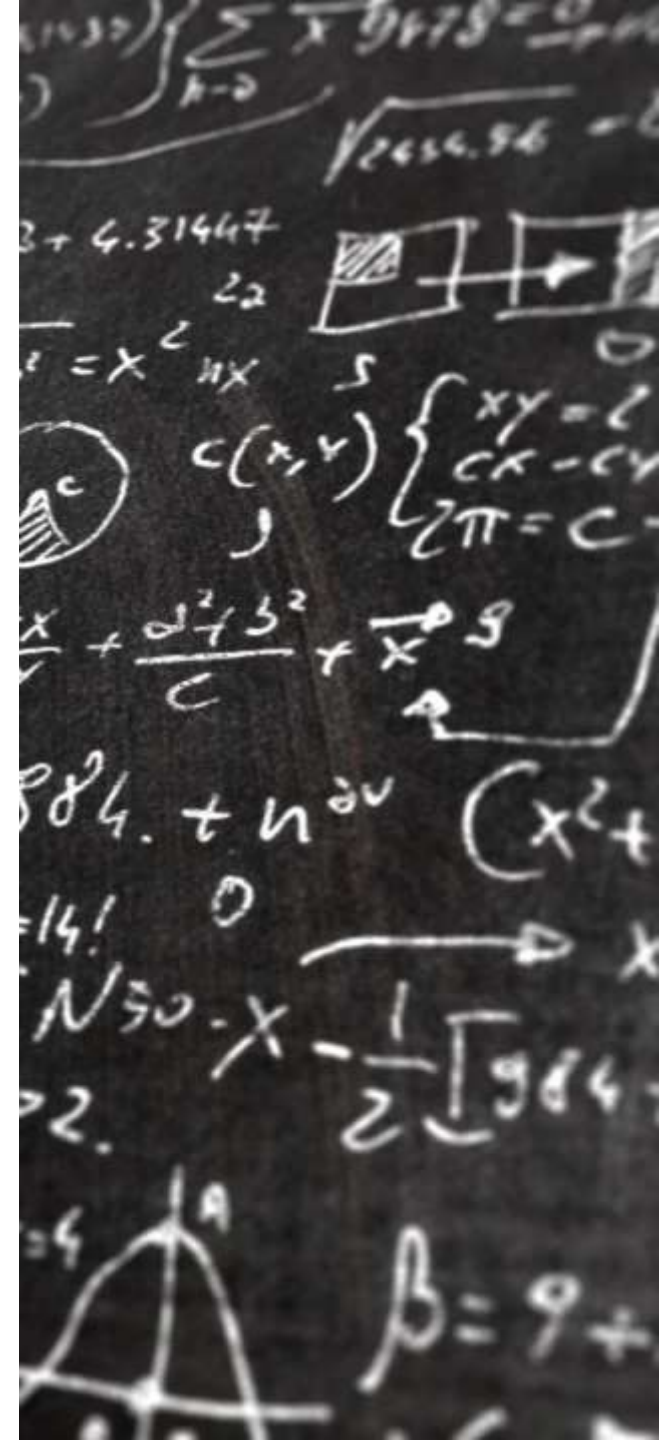
Ferguson, N. (2016, September 29). *Brangelina is dead. So, is the end nigh for globalisation?* South China Morning Post, p. A11.

Gos, D. (2016, May 6). *Is Globalization Really Fueling Populism?* Retrieved September 26, 2016, from Project Syndicate: https://www.project-syndicate.org/commentary/understandfactors_behind-rising-populism-by-daniel-gros-2016-05?barrier=true.

Kennedy, op. cit.

Teori Liberal: Pendekatan-Pendekatan dalam Mengelola Keragaman/Pluralisme

- Teori Multikulturalisme (Liberalisme)
 - Pendekatan “politik universal,” melalui dua cara:
 - pemberlakuan “persamaan politik formal” (*formal political equality*)- universal suffrage
 - pemberlakuan “persamaan kesempatan” (*equality of opportunity*)—
 - Pendekatan “politik perbedaan” (*the politics of difference*)-->setiap orang dihargai sama tetapi juga memiliki identitas yang berbeda→setiap keunikan perlu mendapatkan pengakuan (*recognition*) yang sama—Rekognisi berarti penerimaan atas identitas diri individu yang sadar terhadap identitas diri individu yang sadar lainnya, dan tuntutan akan martabat mendorong pentingnya “politik tentang pengakuan yang setara”
- Apa yang menonjol dari pendekatan multikulturalisme (Liberalisme)?
 - Menekankan Netralitas negara
 - identitas (jati diri, kepribadian) sosial disamakan dengan identitas kebudayaan, dan identitas dipahami sebagai statis dan tidak berubah.





Kritik terhadap Pendekatan Liberal/Multikulturalisme

- Kritik mengatakan: Identitas ditentukan oleh interaksi dengan orang-orang lain, dan tidak terbentuk atau terjadi dalam isolasi. Keberadaan tidak seharusnya dipahami sebagai kehadiran (*being as presence*) dan objektifitas tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri (*being inherent in themselves*), tetapi sebagai konstruksi sosial, dan objektifitas sosial selalu dibentuk melalui tindakan kekuasaan (*acts of power*)
- Menurut para pengkritik: Teori rekognisi mengandung kelemahan karena tidak memiliki analisis kekuasaan (*analysis of power*), sementara identitas selalu dikonstruksi melalui hubungan-hubungan kekuasaan (*relations of power*). Problem identitas bukan hanya problem rekognisi tetapi juga problem tentang kekuasaan: sekelompok orang, melalui sistem dan struktur kekuasaan, mempertahankan hak-hak istimewanya (*privilege*) atas kelompok/bangsa lain.
- Karena itu, pendekatan liberal/multikultural gagal menjawab persoalan identitas yang terkait dengan hirarki sosial yang tidak adil.

Komitmen
Etis dan Arah
Pemihakan
dalam CCE?

Mendorong Tranformasi Sosial
menuju Keadilan Sosial?



Mengatasi Struktur Ketidakadilan:

Relasi
Subordinasi

Relasi Opresi
(Penindasan)

Konteks Domestik #1

Tujuan membentuk Negara Merdeka:

Satu buat Semua, Semua Buat Satu, Semua buat Semua

Arti politik dan pendidikan kewarganegaraan bertujuan menangani secara terus menerus tatanan atau organisasi bersama atau sistem kerjasama dalam masyarakat (Indonesia) yang paling baik dan tepat (*Good and Right Society*)/ Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur/Well-Ordered Society?

- Visi Bernegara: Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur
- Misi Bernegara:
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia

- Apa arti memilih Republik? (*Res Publica, Vox Populi—Cicero*):

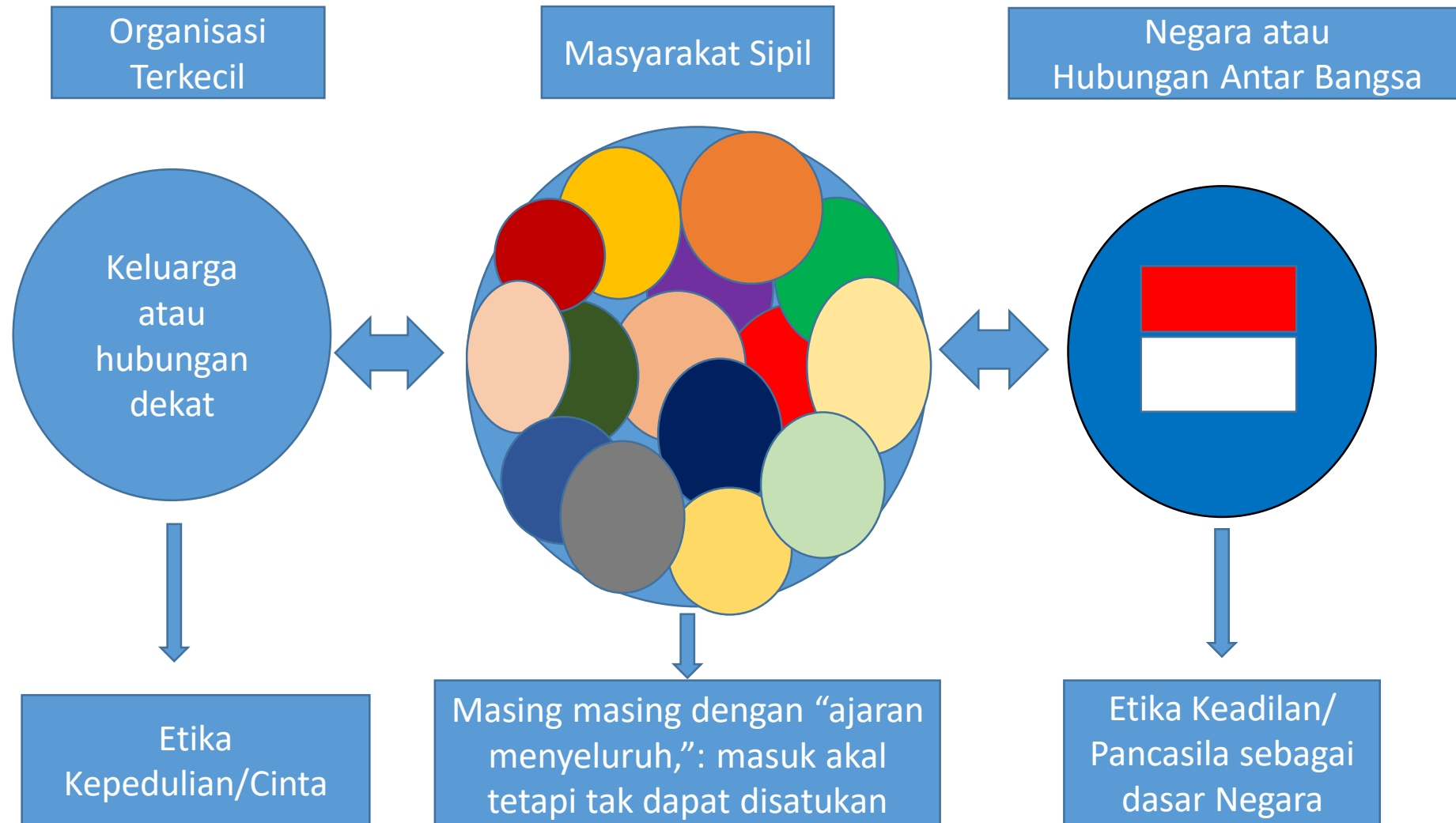
Republik adalah negara bangsa sebagai kenyataan sosial yang terbentuk dari kumpulan banyak orang yang menyetujui tentang apa yang esensial bagi keadilan ketika mereka berhubungan satu sama lain. Republik menekankan gagasan tentang kewarganegaraan dengan 4 ciri utama sebagai berikut:

- 1) Warga negara yang mengenali tanggungjawab sipil/kemasyarakatan (*civic obligation*) tertentu.
- 2) Warga negara yang memiliki kesadaran untuk menciptakan “kebaikan bersama” (the common good).
- 3) Warga negara yang memiliki “keutamaan/kebajikan civic” (*civic virtue*).
- 4) Keterlibatan masyarakat dalam demokrasi melibatkan aspek musyawarah (deliberasi)

Pancasila Setelah Orde Baru Suharto (setelah 1998), membawa wacana ke arah perubahan utama (setidaknya) berikut ini:

- Penerimaan gagasan tentang “limited government”: mencegah atau mengurangi kekuasaan yang sewenang-wenang → (gagasan trias politika dan check and balances dalam kekuasaan), melalui penataan kembali institusi politik.
- Pengakuan terhadap pemisahan antara Negara dan Masyarakat Sipil (Civil Society) dan hak Hak “Privacy” Warga Negara.
- Memastikan bagaimana minoritas dilindungi dan dihormati dalam demokrasi.

Empat model Pengelompokkan (*collective identification*) Manusia (Wilayah Privat, Masyarakat Sipil, Negara, Hubungan Antar Bangsa/Internasional)

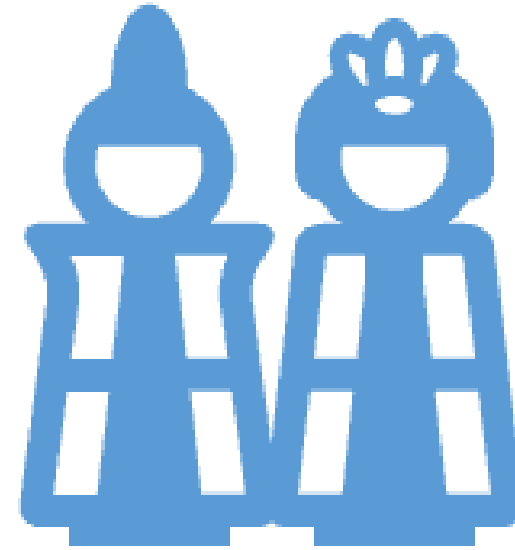


- **“Privasi”** merujuk pada **suatu kondisi ketika individu menikmati sebuah ranah tersendiri yang terpisah dari pihak lain**. Ranah ini dapat berupa ruang fisik yang terisolasi dan bebas dari pengamatan maupun intervensi orang lain, atau dapat pula merujuk pada jenis-jenis informasi yang bersifat personal dan tidak dapat diakses oleh pihak lain. Dengan demikian, **“penghormatan terhadap privasi”** berarti bahwa seseorang tidak boleh—tanpa alasan yang sah dan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu (misalnya berdasarkan persetujuan atau demi perlindungan kepentingan vital pihak lain)—memasuki atau mengintervensi ranah privat seorang individu.
- **“Integritas”** merujuk pada **suatu sifat atau kualitas yang dimiliki oleh seorang agen sosial yang bergerak pada persinggungan antara ranah privat dan ranah publik**. Seorang agen sosial memiliki kepentingan untuk menikmati suatu ranah rahasia yang tertutup bagi pihak lain, sekaligus berpartisipasi bersama orang lain dalam kehidupan sosial. Kenikmatan atas ranah privat memungkinkan individu untuk terlibat dalam kehidupan sosial yang kompleks, dengan beragam jenis relasi terhadap individu maupun kelompok lain. Oleh karena itu, **“penghormatan terhadap integritas”** berarti adanya **pengakuan sosial terhadap upaya agen individu dalam mengelola dan menyeimbangkan relasi antara kehidupan privat dan kehidupan sosialnya**.

Source: Hansson, Mats G. *The Private Sphere: An Emotional Territory and Its Agent*. Philosophical Studies in Contemporary Culture, Volume 15. Springer Science + Business Media B.V., 2008. ISBN: 978-1-4020-6651-1.)

Apakah “Collective Identifications?”

- Tindakan politik kolektif tidak membutuhkan identitas yang stabil dan essentialized (essentialized and stable identity)
- Identitas kolektif berubah, bergerak, bergeser dan saling bergantung: identitas yang diessentialized bukan merupakan imajinasi politik yang menjanjikan karena subject tidak pernah membentuk satu kesatuan, transparan, dan terjahit dengan kokoh.
- Tetapi “identifikasi kolektif” juga merupakan aliansi strategis diantara kelompok kelompok yang membantu “rantai kesetaraan” (chain of equivalent) satu sama lain dalam rangka perjuangan kekuasaan
- Asumsi bahwa peningkatan yang semakin baik (maju)— advancement— rationalitas dan individualisme dapat mengatasi dan menyingkirkan gairah, emosi dan passion dalam politik kemungkinan menyesatkan.



Sejumlah Cara Pandang Tentang Konflik dan Ketidaksepakatan (Disagreement)

The Burden of Judgment: mrp sumber atau penyebab ketidaksepakatan diantara orang orang yg “reasonable”; reasonable vs. rational

Ketidaksepakatan sebagai dampak dari ketidaksempurnaan (*human hazard atau imperfections*) atau merupakan hal biasa yang menentukan dalam politik.

Karena bukan produk atau hasil dari ketidaksempurnaan: asal, sumber atau penyebab ketidaksepakatan atau konflik diantara orang orang yang “reasonable” menurut garis ini adalah interpretasi dan penerapan dari “fundamental ethico political principles” spt kebebasan dan kesetaraan.



Identity Groups (Pembagian Menurut Guttman)

- Cultural Identity Groups
- Voluntary Groups
- Identification by Ascription
- Religious Identity



Many individuals form and join identity groups for many politically relevant reasons (Guttman, 2003: 210)

- Untuk **mengekspresikan secara publik** apa yang mereka anggap sebagai aspek penting dari identitas mereka;
- Untuk **melestarikan kebudayaan** yang mereka identifikasikan dengan kelompok tersebut;
- Untuk **memperoleh keuntungan material (dan bentuk-bentuk keuntungan lainnya)** bagi diri mereka sendiri maupun kelompoknya, terlepas dari apakah tuntutan tersebut dapat dibenarkan atau tidak;
- Untuk **berjuang secara kolektif**, baik untuk melawan maupun mendukung praktik diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya;
- Untuk **mendapatkan dukungan timbal balik** dari pihak-pihak lain yang berbagi sebagian dari identitas sosial yang sama; dan
- Untuk **mengekspresikan serta mewujudkan komitmen-komitmen etis** yang mereka bagikan bersama suatu kelompok.



The Dilemma of Identity Group in Democracy (Guttmann, 2003)

- Kelompok-kelompok identitas **bukanlah sumber nilai yang paling fundamental** dalam setiap demokrasi yang berkomitmen pada **penghormatan yang setara terhadap individu**.
- Kelompok-kelompok identitas dapat **sekaligus membantu maupun menghambat** terwujudnya penghormatan yang setara terhadap individu, serta—secara lebih luas—keadilan demokratis.
- Sebagian kelompok identitas justru **mereproduksi stereotip negatif, menghasut ketidakadilan, dan menghambat upaya pencapaian keadilan**.
- Sebaliknya, kelompok-kelompok identitas lainnya **berkontribusi dalam mengatasi stereotip negatif dan melawan ketidakadilan** dalam konteks **ketimpangan kewargaan** serta **ketidaksetaraan kebebasan dan kesempatan**.
- Selain itu, kelompok-kelompok identitas juga dapat **menyediakan dukungan timbal balik dan mengekspresikan identitas bersama** di antara individu-individu yang kehidupannya akan menjadi lebih miskin—secara sosial dan eksistensial—tanpa adanya dukungan dan pengidentifikasian bersama tersebut.

Paradoks Demokrasi

Demokrasi dan Masalah Perbedaan Politik yang Mendalam (*Deep Politics Issues*):

- “Kebebasan-kebebasan itu sendiri yang membentuk inti demokrasi justru membuat konsepsi legitimasi demokrasi menjadi mustahil untuk dipenuhi. Inilah paradoks pembenaran demokratis.”
(Talisse 2009: 15)- Solusi konseptual: *Prosedur vs. Komitmen Moral*
- “Sering kali dicurigai bahwa kritik terhadap, misalnya, prosedur-prosedur demokratis yang mapan hanyalah penyamaran atau proksi dari komitmen moral substantif para pengkritiknya. Namun, dalam kondisi warga demokratis terbelah oleh perbedaan komitmen moral substantif, setiap kritik terhadap prosedur dan institusi yang dapat dikarakterisasi dengan cara ini akan terkutuk pada ketidakberdayaan.”
(Talisse 2009: 7)
- “Biasanya diklaim bahwa demokrasi mengalami kegagalan dari dalam akibat disintegrasi atau pelapukan moral pada tradisi; namun... krisis internal paling serius yang kita hadapi sebagai kaum demokrat bukanlah terutama bersifat moral, meskipun kerap menampakkan diri dalam bentuk konflik moral. Krisis yang kita hadapi pada dasarnya bersifat epistemik: kita kehilangan kemampuan untuk berbeda pendapat satu sama lain; atau, lebih tepatnya, kita kehilangan kemampuan untuk memandang mereka yang tidak sepakat dengan kita sebagai keliru atau salah, alih-alih sebagai jahat, bodoh, tidak jujur, menyimpang, sesat, atau dungu.”
(Talisse 2009: 8) — *epistemologi rakyat (folk epistemology)*
- “Perdebatan politik publik kerap tidak menyediakan ruang bagi pertukaran alasan dan argumen, melainkan menjadi ajang saling melontarkan cercaan; ia berubah menjadi kontestasi sofistis ketika setiap partisipan berusaha menunjukkan diri paling efektif dalam membuat lawannya tampak konyol. Sejak awal, poin filosofis ini patut ditekankan: jika kita kehilangan kapasitas untuk berargumentasi satu sama lain—terutama melintasi perbedaan moral yang mendalam—maka kita akan kehilangan demokrasi kita.” (Talisse 2009: 9)
- “Ketika individu merasa kecewa terhadap kinerja suatu institusi yang seharusnya melayani mereka, tersedia dua pilihan: (1) melakukan *exit* (baik dalam bentuk menghambat maupun tidak menghambat), atau (2) menggunakan *voice*.”

Cited:

-Robert B. Talisse (2009). *Democracy and Moral Conflict*. Cambridge University Press

-Albert Hirschman (1970). *Exit, Voice, and Loyalty*.

*i.e. withdrawal from democratic politics (tak ikut memilih dalam pemilu atau bentuk-bentuk partisipasi politik yang lain).

Idea tentang Perkembangan Moral (Moral Development) dan Pembentukan Karakter

- Seorang pribadi yang berbudi luhur dapat dianalogikan dengan seorang ahli yang memiliki keterampilan-keterampilan yang telah dikembangkan secara tinggi—yakni seperangkat pengetahuan prosedural, deklaratif, dan kondisional—yang diterapkan secara tepat sesuai dengan konteks situasi. Dengan kata lain, teladan moral dalam pengertian yang paling utuh menampilkan kebijaksanaan moral (mengetahui apa yang baik) sekaligus kebijaksanaan praktis (mengetahui bagaimana mewujudkannya dalam situasi konkret). Keahlian moral terletak pada kemampuan menerapkan kebajikan yang tepat, dalam kadar yang tepat, dengan cara yang tepat, dan pada waktu yang tepat. (Narvaez dan Bock, 2014)
- Keahlian merupakan seperangkat kapasitas yang dapat diaktualkan dalam tindakan. Para ahli moral menunjukkan orientasi yang bersifat holistik—yakni kumpulan pengetahuan prosedural, deklaratif, dan kondisional—dalam satu atau lebih dari sekurang-kurangnya empat proses yang krusial bagi perilaku moral: kepekaan etis, penilaian etis, fokus etis, dan tindakan etis.

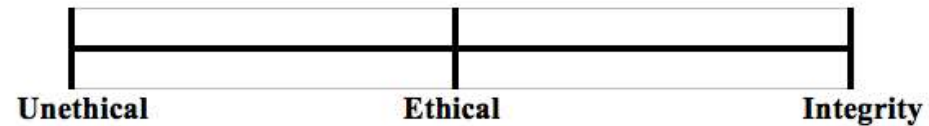
Idea tentang Kemajuan Moral (Moral Progress) (Konsep yang relevan untuk memahami Pancasila Sebagai “Leitsar Dinamis?”)

- “Dalam banyak kasus, kemajuan moral terhambat bukan hanya oleh relasi kuasa, tetapi juga oleh norma-norma sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, untuk mengubah norma-norma sosial yang tidak adil tersebut, kita tidak hanya memerlukan penalaran moral yang lebih baik, melainkan juga suatu bentuk penalaran kolektif yang khas, yang saya sebut sebagai *we-reasoning*.” (Tam 2020: 74)
- “Untuk mencapai kemajuan moral, kita perlu melampaui penalaran murni. Penalaran murni terlalu lemah untuk mengoreksi bias-bias yang berakar dalam relasi kuasa. Namun, sering kali diabaikan fakta bahwa bahkan penalaran moral yang bersifat demokratis pun tidak cukup kuat untuk mengatasi alasan-alasan parsial dan sentimen-sentimen yang berakar dalam norma-norma sosial. *We-reasoning*, sebagaimana telah saya tunjukkan, juga merupakan prasyarat yang niscaya. Demi memperbaiki cara berpikir dan bertindak kita secara kolektif, kelompok yang berkuasa perlu belajar dari mereka yang tertindas. Akan tetapi, pelajaran-pelajaran moral tersebut juga harus meresap ke dalam tata gramatika sosial kehidupan komunal. Dan untuk tugas yang terakhir ini, beban tanggung jawab terutama berada pada para anggota kelompok yang berkuasa itu sendiri.”

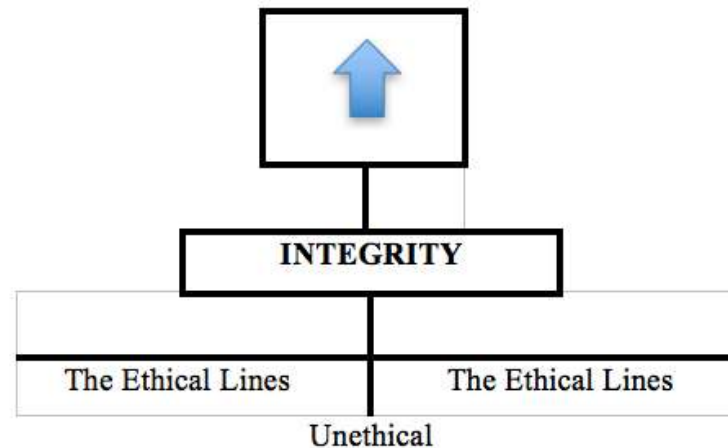
Source:

- Albert W. Musschenga and Gerben Meynen, “Moral Progress: an Introduction”. *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 20, No. 1, Special Issue: Moral Progress (February 2017), pp. 3-15
- Agnes Tam. “Why Moral Reasoning Is Insufficient for Moral Progress.” *The Journal of Political Philosophy*: Volume 28, Number 1, 2020, pp. 73–96

Hukum, Etika, dan Integritas



Etika adalah perilaku pasif—yang penting berada dalam ‘batas garis’ (*boundary lines*)
Integritas membutuhkan tindakan—meningkat mengatasi ‘batas garis’ (*boundary lines*)



Source: Michael R. Weber, “The difference between being ethical and possessing integrity is minute, but the impact on others and yourself is dramatic” in [FRI_DifferenceBetweenEthics_and_Integrity_9_15_TO_10_15_AM.pdf](#)

Teori Moral tentang Standard “kebaikan” dalam membimbing Tindakan (Perilaku) dan Kebijakan Sosial Politik:

- “Virtues” (Kebajikan/Keutamaan)
- Deontologi
- Konsekuensialisme (Utilitarianisme)
- Moralisme



Tiga Jenis Pengetahuan (Aristoteles)

Aristoteles membedakan pengetahuan manusia menjadi tiga bentuk utama:

- **Phronesis** → kebijaksanaan praktis
- **Episteme** → pengetahuan ilmiah-teoretis
- **Techne** → keterampilan membuat / memproduksi

Ketiganya **tidak setara**, tetapi **saling melengkapi** dalam kehidupan manusia.

- **Episteme tanpa phronesis** → teknokrasi dingin
- **Techne tanpa phronesis** → efisiensi tanpa etika
- **Phronesis tanpa episteme & techne** → niat baik tanpa kapasitas

Kehidupan manusia yang baik membutuhkan ketiganya, dengan **phronesis** sebagai penuntun utama.

Lima Tingkat Akuisisi Keahlian dalam Proses Pembelajaran (Model Dreyfus)

- Lima tingkat dalam proses pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut.
 - (1) **Pemula (*novice*)** bertindak berdasarkan unsur-unsur dan aturan yang bersifat **independen dari konteks**. Pada tahap ini, tindakan dipandu oleh kaidah formal yang eksplisit, tanpa pemahaman situasional yang memadai.
 - (2) **Pemula tingkat lanjut (*advanced beginner*)** mulai menggunakan **unsur-unsur situasional**, yang dipelajari melalui kemampuan mengenali dan menafsirkan pengalaman dari situasi-situasi serupa. Pengalaman mulai berperan, meskipun masih belum terintegrasi secara utuh.
 - (3) **Pelaku kompeten (*competent performer*)** dicirikan oleh kemampuan **memilih tujuan dan menyusun rencana tindakan secara sadar dan reflektif** sebagai dasar bertindak. Tujuan dan rencana ini berfungsi untuk menstrukturkan serta menyimpan sejumlah besar informasi, baik yang bergantung pada konteks maupun yang bersifat independen dari konteks. Pada tahap ini, tanggung jawab personal dan pengambilan keputusan menjadi semakin menonjol.
 - (4) **Pelaku mahir (*proficient performer*)** mampu **mengidentifikasi masalah, tujuan, dan rencana secara intuitif**, berdasarkan perspektif yang dibentuk oleh pengalaman praksisnya sendiri. Namun demikian, intuisi tersebut masih **dikontrol dan diverifikasi melalui evaluasi analitis** sebelum tindakan dijalankan.
 - (5) **Ahli (*expert*)**, pada akhirnya, menunjukkan perilaku yang **intuitif, holistik, dan sinkronik**. Dalam arti ini, suatu situasi secara seketika memunculkan gambaran terpadu mengenai masalah, tujuan, rencana, keputusan, dan tindakan, tanpa terpecah ke dalam tahap-tahap yang terpisah. Inilah tingkat **keahlian manusia yang sejati**, yang ditandai oleh kinerja yang mengalir, spontan, dan relatif tanpa usaha, serta tidak terhambat oleh pertimbangan analitis yang berlebihan.

Source:

Hubert and Stuart Dreyfus, Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer (New York: Free Press, 1986, revised 1988).

Sejumlah Pengertian yang Sering Berhubungan dengan Pancasila sebagai (salah satu) Matkul CCE

- Agama: Setua umur manusia. Tidak ada cara untuk menarik saripari atau kesesuaian ajaran keagamaan dengan Filsafat Sosial/ideologi Politik.
- Filsafat Sosial/Ideologi Politik (Termasuk teori dan Prinsip Keadilan Sosial misalnya): Buatan atau ciptaan manusia. Sebuah filsafat sosial (misalnya liberalisme/sosialisme dsb) seringkali bukan merupakan doktrin yang monolitik (tunggal).
- Teknologi: Produk Ilmu Pengetahuan. Perkembangan teknologi tidak membuat manusia menjadi sama dalam cara berpikirnya, dan perilakunya.
- Perbedaan Konsep: Prinsip, Kebijakan, Hukum/Aturan (Rules).

Nilai-Nilai, Prinsip-Prinsip, Kebijakan,
Aturan/Hukum



Principles, Policies, and Rules

- Prinsip (*principles*) adalah Standard yang harus dipatuhi, bukan karena standard ini akan menyebabkan perbaikan situasi sosial, politik atau ekonomi yang diinginkan tetapi karena merupakan kebutuhan rasa keadilan atau kepatutan (fairness) atau karena dimensi moral yang lain
- Kebijakan (*policies*) adalah sejenis standard yang menentukan suatu tujuan yang akan dicapai, umumnya sebagai peningkatan keadaan sosial, ekonomi dan politik sebuah masyarakat (meskipun sejumlah tujuan berorientasi negatif misalnya kebijakan untuk melindungi diri dari perubahan yang tidak diinginkan
 - standard bahwa kecelakaan lalu lintas harus diturunkan merupakan sebuah kebijakan, tetapi standard bahwa tidak seorangpun boleh mengambil keuntungan dengan cara yang salah atau melalui tindakan yang salah adalah prinsip (no man may profit by his own wrong)
 - Dalam situasi bencana, misalnya, “save the greatest numbers numbers” (SGN) atau Save All who can be save (SALL) merupakan dua pilihan prinsip,
 - antara efisiensi dan equality: A maxim “treat those who will benefit most from treatment and live longest as a result” (dalam situasi bencana keterbatasan ventilator misalnya) atau Egalitarian Model: “those who are dangerously wounded must be tended first, entirely without regard to rank or distinction” (D.J. Larrey, Napoleon’s Surgeon General)

Source:

- R. Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press: Cambridge.
- N. Zack, 2009. *Ethics for Disaster*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc: Maryland.

- Rules berlaku dengan cara ya atau tidak sama sekali (“all-or-nothing fashion”): i.e. imagine a game of basketball rule. A rule of law, like the rule that a will is invalid unless signed by three witnesses, fit the model well.
- Contoh prinsip berbeda: Principle, no man may profit from his own wrong, it does not mean that “the law never permits a man to profit from wrongs he commits”. Example (notorious): “If I trespass on your land long enough, some day I will gain a right to cross your land whenever I please...”
- Rules maybe binding: a). because it is accepted b). because it is valid-→rules of recognition

Source: Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press: Cambridge.



Terimakasih